



ANALISIS DAMPAK KETIDAKPASTIAN GEOPOLITIK GLOBAL TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN INFLASI DOMESTIK

Adina Litriwani

adinalitriwani20@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Shafwatul Hilwa

shafwahhilwa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ahmad Wahyudi Zein

ahmadwahyudizein@gmail.com

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi Penulis: adinalitriwani20@gmail.com

***Abstract.** In the era of globalization, characterized by high interconnectedness between countries, global geopolitical uncertainty is an external factor that plays a significant role in influencing a country's economic condition. Various geopolitical events, such as international conflicts, trade disputes, the imposition of economic sanctions, and power struggles between countries, can cause instability in the global economic system. This situation has the potential to disrupt international supply chains, affect investment and trade flows, and increase volatility in financial markets and commodity prices. As a result, domestic economic stability and inflation rates become vulnerable to various shocks originating from the external environment. This study aims to examine the effect of global geopolitical uncertainty on domestic economic stability and inflation, and to formulate policy implications that can be implemented to strengthen national economic resilience. This study uses a quantitative approach, utilizing secondary data from various official national and international sources. The analysis is conducted to examine the relationship between changes in the level of global geopolitical uncertainty and indicators of domestic economic stability and inflation.*

***Keywords:** Global Geopolitical Uncertainty; Economic Stability; Domestic Inflation; Economic Growth; Monetary Policy.*

Abstrak. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh tingginya keterhubungan antarnegara, ketidakpastian geopolitik global menjadi salah satu faktor eksternal yang berperan penting dalam memengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Berbagai peristiwa geopolitik, seperti konflik internasional, perselisihan perdagangan, penerapan sanksi ekonomi, dan persaingan kekuatan antarnegara, dapat menimbulkan ketidakstabilan pada sistem ekonomi global. Situasi tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok internasional, memengaruhi arus investasi dan perdagangan, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas. Akibatnya, stabilitas ekonomi domestik dan tingkat inflasi menjadi rentan terhadap berbagai guncangan yang berasal dari lingkungan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi dan inflasi domestik, serta merumuskan implikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data

Naskah Masuk: 21 Juni 2026 ; Revisi: 21 Juni 2026; Diterima: 21 Juni 2026; ; Terbit: 22 Juni 2026.

sekunder yang berasal dari berbagai sumber resmi nasional maupun internasional. Analisis dilakukan untuk melihat hubungan antara perubahan tingkat ketidakpastian geopolitik global dengan indikator stabilitas ekonomi dan inflasi domestik.

Kata kunci: Ketidakpastian Geopolitik Global; Stabilitas Ekonomi; Inflasi Domestik; Pertumbuhan Ekonomi; Kebijakan Moneter.

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang kian kompleks, keterkaitan antara dinamika geopolitik, jalur perdagangan global, dan stabilitas ekonomi berjalan semakin beriringan. Konflik geopolitik yang mencakup perang dagang, perseteruan militer, hingga persaingan antarnegara adidaya kini bertindak sebagai faktor penentu utama yang mengubah arah dan pola investasi asing di tingkat global (Baldwin & Freeman, 2024; Li & Wang, 2024). Ketergantungan ini menciptakan ketidakpastian baru dalam rantai pasok global, di mana keputusan alokasi modal kini sangat bergantung pada tingkat kerentanan geopolitik suatu wilayah. Akibatnya, efisiensi biaya tidak lagi menjadi satu-satunya prioritas, melainkan telah bergeser pada aspek ketahanan dan keamanan operasional jangka panjang.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dinamika yang terjadi menunjukkan sebuah paradoks. Di satu pihak, eskalasi risiko global berpotensi mengikis minat investor akibat kekhawatiran terhadap stabilitas politik, jaminan keamanan, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Investor pada umumnya akan menjauhi negara-negara yang dianggap rentan atau memiliki keterpaparan tinggi terhadap konflik dan volatilitas global (Narula, 2021; IMF, 2025). Di sisi lain, ketegangan geopolitik antarnegara kekuatan besar justru dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi basis produksi alternatif. Ketika investor global berusaha melakukan diversifikasi risiko dengan memindahkan rantai pasok mereka keluar dari wilayah konflik, negara berkembang yang netral dan stabil seperti Indonesia berpotensi menangkap limpahan arus modal tersebut.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di bawah tekanan dalam beberapa waktu belakangan ini. Keterpurukan nilai rupiah menjadi isu penting karena memengaruhi berbagai aspek ekonomi, mulai dari biaya barang impor hingga kestabilan investasi. Situasi ini dipengaruhi oleh elemen-elemen internasional serta lokal yang saling terhubung. Menurut data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah

sering mengalami fluktuasi akibat perubahan kondisi ekonomi dunia. Bank Indonesia (BI) menyebut kondisi fundamental dan ketahanan ekonomi Indonesia kuat dalam menghadapi gejolak geopolitik, termasuk perang di Teluk Persia. Salah satu indikatornya yaitu inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi di atas 5% (Universitas Nasional, 2026).

Penguatan dolar AS melemahkan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Suku bunga tinggi mendorong investor pindah ke aset dolar yang dianggap lebih aman. Dalam konteks ekonomi global, konflik AS Israel dan Iran memberikan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi dunia melalui kenaikan harga energi, inflasi global, serta perlambatan perdagangan internasional (Agustina & Finaldin, 2019).

Risiko politik meningkat di seluruh dunia saat ini dan memiliki dampak besar pada pola konsumsi global dan tren investasi infrastruktur. Ketidakstabilan global menyebabkan penurunan tajam dalam arus masuk modal asing, memaksa banyak negara berkembang seperti Indonesia untuk berpikir keras tentang bagaimana mendanai berbagai proyek strategis mereka. Namun, dana asing masih menjadi mesin utama dalam pengembangan infrastruktur penting mulai dari jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, hingga proyek energi terbarukan (UNESCAP, 2023).

Menariknya, ekonomi Indonesia justru menunjukkan daya tahannya yang luar biasa dalam kekacauan geopolitik tersebut. Berkat stabilitas politik yang telah dipertahankan, kebijakan fiskal dan moneter yang solid, dan arah pembangunan yang terukur, investor asing masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap tanah air. Secara makro, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5% hingga tahun 2023. Kekuatan utama yang menopang fondasi ini adalah tingginya konsumsi domestik (World Bank, 2023), yang sekaligus menyelamatkan Indonesia ketika negara-negara berkembang mulai goyah.

Daya Tarik Hilirisasi dan Energi Hijau Kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya di sektor pertambangan dan energi terbarukan lainnya, menjadi daya tarik yang kuat bagi investor global, selain faktor stabilitasnya. Momentum ini sangat diperparah dengan adanya krisis energi di dunia karena konflik geopolitik, yang ditambah dengan masifnya transisi menuju ekonomi rendah karbon (IEA, 2022).“Pemerintah juga cerdas memanfaatkan peluang dengan meningkatkan daya

saing melalui kebijakan hilirisasi industri dan ramah lingkungan, seperti pada pengembangan komoditas nikel dan energi surya. Langkah strategis tersebut sangat sejalan dengan tren global, yaitu investor saat ini cenderung lebih memilih negara-negara yang berkomitmen penuh terhadap kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika geopolitik global memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan ekonomi dan aliran investasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik geopolitik, fluktuasi nilai tukar, serta perlambatan perdagangan internasional dapat menimbulkan berbagai risiko ekonomik, Indonesia menunjukkan kapasitas yang cukup baik dalam mempertahankan ketahanan ekonominya melalui kestabilan makroekonomi, kebijakan fiskal dan moneter yang dapat dipercaya, serta penguatan sektor-sektor strategis nasional. Situasi ini membuat Indonesia tetap menarik bagi para investor di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana risiko geopolitik global memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Teori Penentuan Nilai Tukar Berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) atau Interest Rate Parity (IRP)

Purchasing Power Parity (PPP) atau Paritas Daya Beli merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai tukar antar mata uang akan selalu bergerak menyesuaikan diri berdasarkan tingkat harga barang dan daya beli di masing-masing negara tersebut. Dengan kata lain, barang yang sama dan memiliki karakteristik identik seharusnya memiliki harga yang sama di negara yang berbeda setelah harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang yang sama. Teori ini berasumsi bahwa tidak terdapat hambatan perdagangan maupun biaya tambahan yang signifikan. Oleh karena itu, apabila harga suatu barang identik lebih murah di satu negara dibandingkan negara lain setelah dikonversi ke mata uang yang sama, maka akan muncul kecenderungan penyesuaian pada

nilai tukar hingga perbedaan harga tersebut berkurang atau hilang. Dengan demikian, PPP menekankan bahwa kurs mata uang dalam jangka panjang cenderung mencerminkan perbedaan tingkat harga antarnegara sehingga daya beli menjadi seimbang.

Interest Rate Parity (IRP) atau Paritas Suku Bunga adalah suatu kondisi yang menjelaskan bahwa perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara akan tercermin pada perbedaan antara kurs forward dan kurs spot dari mata uang kedua negara tersebut. Dengan kata lain, selisih suku bunga tidak akan memberikan peluang keuntungan tanpa risiko karena perbedaan tersebut telah diimbangi oleh penyesuaian nilai tukar di pasar forward. Teori ini menjelaskan bahwa apabila suatu negara memiliki besaran suku bunga yang lebih berada pada level lebih atas dibandingkan negara lain, maka mata uang negara tersebut cenderung diperdagangkan dengan diskon atau premi tertentu di pasar forward. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh dari investasi pada negara dengan suku bunga lebih tinggi akan diimbangi oleh perubahan nilai tukar yang tercermin dalam selisih antara kurs spot dan kurs forward. Dengan demikian, hubungan antara suku bunga dan nilai tukar akan berada dalam keadaan seimbang sehingga tidak terdapat peluang arbitrase yang bebas risiko di pasar keuangan internasional.

Teori Inflasi

Inflasi merupakan kondisi ketika terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Dampak dari kondisi ini adalah menurunnya daya beli masyarakat, sehingga jumlah uang yang sama hanya mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung secara luas dan berkelanjutan. Keadaan ini menyebabkan pelaku usaha memerlukan dana yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun menutupi biaya operasional perusahaan.

Sebagai salah satu fenomena ekonomi yang menjadi perhatian hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga secara umum dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih melakukan aktivitas kerja dibandingkan menempatkan dana pada lembaga keuangan atau instrumen investasi. Kondisi tersebut terjadi karena inflasi dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu menurunnya efisiensi dan

produktivitas produksi, meningkatnya biaya modal, serta munculnya ketidakpastian mengenai biaya dan pendapatan pada masa mendatang. Tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari sudut pandang pengertiannya, inflasi dapat dipahami sebagai penurunan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara apabila dibandingkan dengan komoditas tertentu, seperti emas, maupun terhadap nilai mata uang asing. Oleh karena itu, kestabilan inflasi perlu dijaga agar tetap berada pada tingkat yang rendah dan terkendali guna mendukung stabilitas perekonomian.

Indeks Ketidakpastian Geopolitik

Indeks Risiko Geopolitik menawarkan evaluasi komprehensif terhadap risiko politik, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi negara dan industri di seluruh dunia. Tujuan dari indeks ini adalah untuk menawarkan alat yang efektif untuk menilai risiko geopolitik suatu negara, yang semakin penting untuk pengambilan keputusan strategis perusahaan multinasional, khususnya dalam keputusan yang berkaitan dengan fasilitas produksi atau investasi asing.

Secara formal, geopolitik adalah studi tentang bagaimana geografi memengaruhi politik dan hubungan antar negara (Foster, 2006 dan Dijkink, 2009). Sebaliknya, penggunaan istilah geopolitik secara populer lebih kompleks dan diperdebatkan, mulai dari definisi sempit hingga luas tentang apa yang termasuk geografi dan siapa aktor politik yang relevan. Dalam *A Dictionary of Human Geography*, Rogers, Castree, dan Kitchin (2013) menyatakan bahwa media sering merujuk pada masalah geopolitik untuk menggambarkan dampak krisis internasional dan kekerasan internasional. Inilah perspektif yang kami adopsi di sini. Kami mendefinisikan risiko geopolitik sebagai ancaman, realisasi, dan eskalasi peristiwa buruk yang terkait dengan perang, terorisme, dan ketegangan apa pun di antara negara dan aktor politik yang memengaruhi jalannya hubungan internasional yang damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi dan tingkat inflasi domestik melalui penelaahan berbagai sumber literatur dan data yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan penelitian, serta publikasi terpercaya lainnya yang berkaitan dengan isu geopolitik, stabilitas ekonomi, dan inflasi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengategorikan, serta menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam berbagai sumber tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara ketidakpastian geopolitik global dan kondisi ekonomi domestik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter (Transmission Channels)

Menurut Frederic S. Mishkin, *transmission channels* atau saluran transmisi merupakan berbagai mekanisme yang menjadi penghubung antara kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dengan perubahan yang terjadi pada aktivitas perekonomian dan tingkat inflasi. Melalui saluran-saluran tersebut, setiap perubahan pada instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga atau jumlah uang beredar, akan diteruskan ke berbagai sektor ekonomi sebelum akhirnya memengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter, yaitu stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses transmisi ini tidak berlangsung secara langsung maupun sederhana, melainkan melalui tahapan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak yang saling berinteraksi.

Kompleksitas tersebut muncul karena efektivitas kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh respons bank sentral sebagai pembuat kebijakan, lembaga perbankan sebagai penyalur dana, pasar keuangan sebagai sarana intermediasi, dunia usaha sebagai pelaku investasi dan produksi, serta masyarakat sebagai konsumen dan pemilik dana. Setiap perubahan perilaku dari pihak-pihak tersebut dapat memengaruhi kecepatan dan besarnya dampak kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi dan inflasi. Oleh karena itu, saluran transmisi menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana kebijakan

moneter dapat bekerja dan menghasilkan pengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang menjelaskan bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan sektor keuangan hingga akhirnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Taylor (1995), mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat diartikan sebagai proses penyaluran keputusan kebijakan moneter yang kemudian berdampak pada perubahan produk domestik bruto (PDB) riil dan tingkat inflasi. Dengan kata lain, kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral akan memengaruhi variabel-variabel ekonomi melalui berbagai saluran transmisi sebelum memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga (Warjiyo, 2004).

Dalam kebijakan moneter yang menggunakan kerangka kerja penargetan inflasi, pemahaman mengenai jalur transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian sangat diperlukan. Karena besaran target inflasi yang ditetapkan Bank Sentral dan pencapaian target inflasi tersebut akan ditentukan oleh jalur transmisi mana yang lebih dominan dalam perekonomian. Jika mekanisme transmisi ini kurang dipahami maka akan berakibat tidak kredibelnya kebijakan moneter yang ditetapkan. Sehingga, memahami mekanisme transmisi adalah kunci untuk dapat mengarahkan kebijakan moneter agar dapat mempengaruhi perekonomian riil dan tingkat harga.

Pada kenyataannya, mekanisme ini merupakan sebuah proses yang kompleks, karena transmisi banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertama; pertumbuhan perilaku bank sentral, perbankan, dan pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, kedua; lamanya tenggang waktu (lag) sejak kebijakan moneter ditempuh hingga sasaran akhir (inflasi) tercapai, ketiga; terjadinya perubahan pada saluran transmisi moneter sesuai perkembangan ekonomi dan keuangan suatu Negara.

Menurut Taylor dalam Hardianto (2004:1) mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan (channels) yang dilalui oleh suatu kebijakan moneter hingga dapat mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter yang standar dimulai dari tindakan Bank Sentral melalui perubahan (shock) instrumen kebijakan moneter. Tindakan ini kemudian mempengaruhi sasaran operasional (operational target) dan sasaran antara (intermediate target) yang pada akhirnya mempengaruhi tujuan akhir kebijakan moneter (final target). Mekanisme transmisi

kebijakan moneter memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan (shock) instrumen kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel makroekonomi lainnya hingga terwujudnya sasaran akhir kebijakan moneter.

Sesuai dengan konsep mekanisme transmisi kebijakan moneter, kebijakan yang diterapkan oleh otoritas moneter dapat memengaruhi tingkat inflasi melalui berbagai jalur, seperti suku bunga, kredit, dan harga aset. Dalam sistem konvensional, misalnya ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI7DRR pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, bank-bank konvensional umumnya merespons dengan menurunkan suku bunga kredit konsumsi maupun kredit usaha. Penurunan biaya pinjaman tersebut mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan permintaan kredit sehingga konsumsi dan investasi meningkat. Kenaikan permintaan agregat ini kemudian dapat memicu inflasi dalam waktu yang relatif cepat karena transmisi melalui jalur suku bunga bekerja secara langsung dan efektif terhadap sektor riil. Di sisi lain, dalam sistem perbankan syariah, peningkatan likuiditas akibat kebijakan moneter syariah mendorong bank syariah untuk memperluas pembiayaan berbasis bagi hasil kepada pelaku usaha, termasuk UMKM. Namun, dampak terhadap inflasi cenderung muncul lebih lambat karena pembiayaan tersebut terlebih dahulu digunakan untuk kegiatan produksi yang memerlukan waktu sebelum menghasilkan output. Oleh karena itu, respons inflasi dalam sistem syariah umumnya lebih lambat dibandingkan sistem konvensional yang lebih cepat memengaruhi sisi permintaan (Liu et al., 2026).

B. Analisis Dampak Geopolitik Terhadap Ekonomi

Menurut Yudistira Hendra Permana, Ph.D., dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, ketidakpastian global saat ini justru menghadirkan tantangan yang lebih rumit dibandingkan konflik terbuka. Ia menjelaskan bahwa dinamika geopolitik tidak selalu berujung pada perang langsung, melainkan diwarnai oleh manuver dan tekanan yang saling menguji antarnegara. Keadaan ini menciptakan ruang ketidakpastian yang luas dan sulit diprediksi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi seperti itu, kebijakan yang dibuat secara tergesa-gesa berpotensi memperbesar risiko yang sudah ada.

Peristiwa geopolitik yang merugikan dapat memicu pergeseran cepat dalam sentimen pasar dan peningkatan tajam dalam ketidakpastian, yang mengungkap kerentanan yang ada di lembaga dan pasar keuangan. Selain itu, hal tersebut dapat

merusak rencana konsumsi dan investasi, dengan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mengaktifkan lingkaran umpan balik yang merugikan antara ekonomi riil dan dunia keuangan. Fitur khusus ini dimulai dengan memberikan gambaran konseptual tentang saluran-saluran di mana risiko geopolitik dapat memengaruhi pasar keuangan zona euro, ekonomi, dan sektor keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan bukti empiris tentang efek risiko geopolitik pada lembaga non-bank dan bank di zona euro.

Kondisi tersebut turut memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi ke depan. Ia menjelaskan bahwa hasil survei terhadap pelaku industri menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap tekanan yang akan semakin besar dalam waktu dekat. Ekonomi makro menggerakkan mata uang secara bertahap. Geopolitik mengubah harganya secara tiba-tiba. Salah satu geopolitik membentuk kembali penetapan harga mata uang di luar ekonomi makro yaitu dengan kepercayaan yang dapat mengatur respons nilai tukar seperti langsung likuiditas, konvertibilitas, dan keandalan institusional menentukan apakah modal tetap berada di dalam negeri atau mengalir keluar. Kemudian keselarasan yang membentuk jalur mata uang jangka panjang dengan mengarahkan kembali arus perdagangan, modal, dan cadangan menuju jaringan yang terpercaya.

Di sisi ekonomi riil, risiko geopolitik dapat memengaruhi ekonomi dengan berdampak negatif pada pertumbuhan PDB riil, inflasi, perdagangan, investasi, konsumsi, dan tabungan. Di sektor perdagangan, ketegangan geopolitik mampu menghalangi ekspor komoditas utama Indonesia karena adanya kebijakan perlindungan dan pergeseran dalam dinamika perdagangan global. Terjadinya fenomena friend-shoring juga mendorong negara-negara memilih rekan dagang yang memiliki kesamaan politik, sehingga Indonesia harus menjaga sikap netral agar bisa tetap memasuki berbagai pasar internasional.

Ketika para investor menghindari mata uang yang berantakan, secara naluriah mereka mencari pelindung yang aman. Namun, pemahaman tentang pelindung yang aman telah berkembang. Saat ini, permintaan tidak lagi hanya bergantung pada reputasi, melainkan pada infrastruktur keuangan, kedalaman pasar, dan kredibilitas institusi. Risiko geopolitik yang terus-menerus berpengaruh terhadap mata uang dengan dampak yang sangat nyata. Pemerintah yang memperkuat lembaga, menjaga kepercayaan

kebijakan, dan tetap terhubung dalam jaringan global berposisi pada sisi yang benar dari arus modal.

Sebaliknya, pemerintah yang gagal melakukan hal ini menghadapi depresiasi mata uang, biaya pendanaan yang lebih tinggi, dan ketidakstabilan domestik. Pilihan ini secara teoretis sederhana, namun secara politik penuh tantangan. Di dunia yang sarat dengan risiko geopolitik yang terus-menerus, kepercayaan harus dibangun, diperbaharui, dan dipertahankan.

Dolar AS masih menjadi yang teratas. Pasar obligasi pemerintah AS tetap menjadi kumpulan sekuritas terbesar dan paling likuid di seluruh dunia, dan pendanaan dalam dolar mendukung perdagangan global, derivatif, dan perbankan internasional. Pada saat krisis, tidak ada mata uang lain yang mampu menyerap aliran modal dalam skala yang serupa. Rupiah bahkan sempat menembus level sekitar Rp 17.105 per dolar AS pada 7 April 2026, atau mendekati titik terlemah dalam sejarahnya. Ini lebih dari sekadar angka; ini adalah sinyal bahwa tekanan terhadap mata uang domestik sedang berada pada langkah yang serius.

Selain kebijakan moneter, Perry Warjiyo, pengemuka di pertemuan Gubernur Bank Indonesia, menekankan peran kebijakan makroprudensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat insentif KLM bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit. Di samping itu, Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, termasuk pengembangan QRIS, transaksi lintas negara yang berbasis mata uang lokal, serta infrastruktur pembayaran ritel, yang semakin memperkuat efisiensi dan inklusi keuangan.

Perry menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang kuat untuk menghadapi tekanan global, didukung oleh koordinasi kebijakan yang erat antara fiskal dan moneter, serta kerangka kebijakan yang semakin matang dan adaptif. Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas sebagai prioritas utama dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan yang data-dependent, forward-looking, dan responsif terhadap dinamika global.

C. Respon Kebijakan Otoritas Domestik

Respon kebijakan otoritas domestik merupakan serangkaian tindakan dan penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral maupun otoritas ekonomi suatu

negara dalam merespons perubahan kondisi ekonomi, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari lingkungan eksternal. Respons tersebut diwujudkan melalui penggunaan berbagai instrumen kebijakan, seperti penetapan suku bunga acuan, intervensi di pasar valuta asing, pengelolaan likuiditas, serta kebijakan makroprudensial yang bertujuan menjaga stabilitas harga, kestabilan nilai tukar, dan ketahanan sistem keuangan. Dalam literatur ekonomi modern, perilaku otoritas moneter dalam merespons berbagai dinamika ekonomi dijelaskan melalui konsep *policy reaction function* atau fungsi reaksi kebijakan, yaitu suatu kerangka yang menggambarkan bagaimana otoritas moneter menyesuaikan instrumen kebijakannya sebagai respons terhadap perubahan inflasi, kesenjangan output, fluktuasi nilai tukar, risiko geopolitik, ketidakpastian kebijakan ekonomi, serta perkembangan kondisi keuangan global (Kwizera, 2024).

Secara teoritis, fungsi reaksi kebijakan berakar pada konsep *Taylor Rule* yang dikembangkan untuk menjelaskan perilaku penetapan suku bunga oleh bank sentral. Dalam kerangka ini, tingkat suku bunga kebijakan ditentukan berdasarkan dua indikator utama, yaitu deviasi inflasi dari target yang telah ditetapkan serta kesenjangan output (*output gap*), yang mencerminkan selisih antara tingkat output aktual dan output potensial suatu perekonomian (Bampinas et al., 2026). Ketika tingkat inflasi berada di atas sasaran yang ditetapkan atau aktivitas ekonomi menunjukkan gejala overheating, bank sentral umumnya merespons dengan menaikkan suku bunga guna menekan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melambat dan tekanan inflasi relatif rendah, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Perkembangan teori kebijakan moneter selanjutnya menunjukkan bahwa pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik perekonomian terbuka (*open economy*), khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki tingkat keterbukaan perdagangan dan arus modal yang relatif tinggi. Dalam konteks ini, nilai tukar menjadi variabel yang sangat penting karena pergerakan kurs dapat memengaruhi inflasi domestik melalui perubahan harga barang impor (*exchange rate pass-through*) serta memengaruhi daya saing ekspor dan arus modal internasional. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar sering kali menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan kebijakan moneter, terutama di negara-negara yang rentan terhadap gejolak eksternal dan volatilitas pasar keuangan global.

Sejalan dengan meningkatnya globalisasi ekonomi dan integrasi pasar keuangan internasional, model Taylor Rule kemudian berkembang menjadi *extended Taylor rule*. Pendekatan ini memperluas cakupan variabel yang diperhatikan oleh bank sentral dengan memasukkan berbagai indikator risiko dan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik (Bossman et al., 2023). Faktor-faktor tersebut meliputi ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan moneter negara maju, ketidakpastian kebijakan ekonomi global, volatilitas harga komoditas internasional, serta kondisi pasar keuangan global yang dapat memengaruhi perilaku investor dan arah pergerakan modal lintas negara.

Dalam praktiknya, peningkatan risiko geopolitik global dapat mendorong terjadinya fenomena *flight to quality*, yaitu perpindahan dana investor dari aset berisiko di negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman di negara maju. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan depresiasi nilai tukar, meningkatkan volatilitas pasar keuangan, dan mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Untuk meredam dampak tersebut, bank sentral dapat merespons melalui penyesuaian suku bunga, intervensi di pasar valuta asing, maupun kebijakan stabilisasi lainnya guna menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas makroekonomi.

Selain itu, ketidakpastian kebijakan ekonomi global (*economic policy uncertainty*) juga menjadi faktor yang semakin diperhatikan dalam formulasi kebijakan moneter. Tingginya tingkat ketidakpastian dapat menyebabkan pelaku ekonomi menunda keputusan investasi dan konsumsi, sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi demikian, bank sentral perlu mempertimbangkan risiko-risiko tersebut dalam menentukan arah kebijakan agar transmisi kebijakan moneter tetap efektif dan mampu mendukung stabilitas ekonomi.

Pada negara-negara emerging market, respons kebijakan otoritas domestik sering kali tidak hanya ditujukan untuk mencapai target inflasi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sektor eksternal dan ketahanan sistem keuangan. Hal ini disebabkan oleh tingginya sensitivitas perekonomian terhadap perubahan kondisi global, termasuk perubahan suku bunga internasional, pergerakan arus modal, serta dinamika harga komoditas dunia. Oleh karena itu, otoritas moneter dituntut untuk menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, respons kebijakan otoritas domestik dapat dipahami sebagai upaya strategis yang dilakukan oleh bank sentral dan otoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah berbagai tantangan domestik maupun global. Efektivitas respons tersebut sangat bergantung pada kemampuan otoritas dalam mengidentifikasi sumber guncangan ekonomi, mengevaluasi risiko yang muncul, serta menentukan kombinasi instrumen kebijakan yang tepat sehingga stabilitas harga, kestabilan nilai tukar, ketahanan sistem keuangan, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dalam jangka panjang.

Tambahan yang dapat memperkuat pembahasan jika ini untuk skripsi/tesis adalah mengaitkan respons kebijakan otoritas domestik dengan konteks Indonesia, misalnya respons Bank Indonesia melalui penyesuaian BI-Rate/BI 7-Day Reverse Repo Rate, intervensi di pasar valas, serta

kebijakan makroprudensial dalam menghadapi risiko geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi dunia. Hal ini akan membuat landasan teoritis lebih relevan dengan objek penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian geopolitik global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan inflasi domestik. Berbagai peristiwa geopolitik seperti konflik internasional, perang dagang, sanksi ekonomi, serta ketegangan antarnegara dapat memengaruhi arus perdagangan, investasi, nilai tukar, dan harga komoditas dunia. Dampak tersebut kemudian menimbulkan tekanan terhadap perekonomian domestik melalui meningkatnya volatilitas pasar keuangan, melemahnya nilai tukar, terganggunya rantai pasok, serta meningkatnya risiko inflasi.

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang terintegrasi dengan perekonomian global, guncangan geopolitik dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi asing, dan stabilitas harga. Namun demikian, Indonesia menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi yang relatif baik melalui fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas politik domestik, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Peran Bank Indonesia dan pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar,

mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kepercayaan investor di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Oleh karena itu, diperlukan respons kebijakan yang adaptif, kredibel, dan terkoordinasi untuk meminimalkan dampak risiko geopolitik terhadap perekonomian nasional. Penguatan ketahanan sektor keuangan, diversifikasi perdagangan dan investasi, serta peningkatan daya saing ekonomi domestik menjadi langkah strategis yang perlu terus dilakukan agar stabilitas ekonomi dan inflasi tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, I. A., & Finaldin, T. (2019). Penyebab Tewasnya Qaseem Soleimani Oleh Amerika Serikat Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Internasional. *Global Mind*, 2(1). <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i1.60>
- Badan Administrasi Keuangan Universitas Nasional, “BI: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Geopolitik yang Tak Menentu,” dipublikasikan 23 April 2026, diakses 19 Juni 2026, <https://bak.unas.ac.id/2026/04/23/bi-fundamental-ekonomi-indonesia-kuat-hadapi-geopolitik-yang-tak-menentu>
- Baldwin, R., & Freeman, R. (2024). *Geopolitical fragmentation and the future of global supply chains*. Geneva: CEPR Press.
- Bampinas, G., Karfakis, I., Panagiotidis, T., & Papapanagiotou, G. (2026). Stocks, currencies, and geopolitical shocks: Evidence from advanced and emerging markets. *Economic Modelling*. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2025.107454>
- Bossmann, A., Gubareva, M., & Teplova, T. (2023). Economic policy uncertainty, geopolitical risk, market sentiment, and regional stocks: asymmetric analyses of the EU sectors. *Eurasian Economic Review*, 13(3–4), 321–372. <https://doi.org/10.1007/s40822-023-00234-y>
- Hardianto, Erwin. “Shariah Transmission Mechanism in Indonesia”. Paper, 2004.
- International Energy Agency (IEA). (2022). *World Energy Outlook 2022*. Paris: OECD/IEA.
- International Monetary Fund (IMF). (2025). *World Economic Outlook Update*. Washington, D.C.: IMF.

- International Energy Agency (IEA). (2022). *World Energy Investment 2022*. Paris: IEA.
- Kwizera, P. A. (2024). Monetary policy reaction function in emerging economies: An empirical analysis. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2411768. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2411768>
- Li, X., & Wang, Y. (2024). The impact of political uncertainty on multinational corporations' investment decisions. *Global Business Review*, 25(2), 146–160.
- Liu, S. Y., Ballo, F. W., Mushlih, M. A. H., & Tiwu, M. I. H. (2026). Analisis mekanisme transmisi kebijakan moneter pada perbankan konvensional dan syariah terhadap inflasi di Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(5), 820–831. <https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2202>
- Mishkin, Frederic S. (1996). "The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy". *Banque de France Bulletin Digest*. 27: 33–44.
- Narula, R. (2021). Rebooting FDI policy in the post-pandemic world. *Transnational Corporations*, 28(2), 1–20.
- Taylor, S and Todd, P.A. 1995, "Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models," *Information Systems Research*. No.6, pp. 144-176.
- UNESCAP. (2023). *Geopolitical Shifts and Investment Trends in Asia-Pacific*. Bangkok: United Nations ESCAP
- Warjiyo, Perry. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Buku Seri Kebanksentralan No.11. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Seizing New Opportunities*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Yochukwita, B. (2025). *Purchasing Power Parity (PPP) & Interest Rate Parity (IRP)*. Universitas Y.A.I., Jakarta.
- Zhan, J. X., Casella, B., & Mirza, H. (2022). Investment facilitation and FDI recovery in developing countries. *Transnational Corporations*, 29(2), 23–45.